

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan implementasi kebijakan sebagaimana yang umum digunakan dalam studi kebijakan publik normatif. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai manifestasi dari kerja aktor politik dan administratif dalam merespons situasi darurat. Dengan menggunakan model manajemen bencana dari David Alexander, pelaksanaan dianalisis dalam tiga tahapan yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

Selanjutnya, penelitian ini lebih menyoroti bagaimana Pemerintah Kabupaten Agam, melalui berbagai perangkat daerah, serta elemen non-pemerintah seperti relawan dan masyarakat sipil, berperan secara praksis dalam menghadapi krisis. Fokus utamanya bukan pada evaluasi peraturan formal, tetapi pada praktik kekuasaan, koordinasi lintas lembaga, dan respons kolektif yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan oleh pemerintah daerah melalui BPBD dan SKPD terkait, menunjukkan adanya upaya kolaboratif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, sosial, koordinatif, dan struktural di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2024 yang dianalisis menggunakan model manajemen bencana *Pre-During-Disaster Model* dari David Alexander:

### 1. Fase sebelum bencana (*Pre-Disaster*)

Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perangkat Daerah zterkait telah mengupayakan pelaksanaan mitigasi dan kesiapsiagaan, seperti penyusunan kajian risiko, edukasi kebencanaan di sekolah, pelatihan evakuasi, hingga pemasangan jalur evakuasi. Namun pelaksanaannya dinilai tidak optimal, karena belum menjangkau seluruh wilayah rawan serta tidak adanya sistem peringatan dini, sehingga kesiapsiagaan sebagian masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini berdampak ketika bencana mengalami peningkatan dampak kerugian di berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur, dan hal lainnya..

### 2. Fase saat bencana (*During Disaster*)

Pelaksanaan pada masa tanggap darurat termasuk cepat, yang mana hal ini dibuktikan dengan pengaktifan posko di beberapa titik disaat kejadian, pelaksanaan evakuasi korban yang tidak keos, distribusi bantuan yang baik, dan respon awal dari pemerintah kabupaten dalam mengambil langkah pelaksanaan penanggulangan bencana meningkat. Berkoordinasi dengan pusat dan provinsi dalam penanganan. Sehingga pelaksanaan penanggulangan dinilai responsif dan adaptif. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala serta hambatan yakni alur pelaporan dari perangkat nagari yang lambat serta keterbatasan dalam pencarian ke wilayah yang sulit dijangkau.

### 3. Fase sesudah bencana (*Post-Disaster*)

Pelaksanaan diarahkan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya pemulihan dilakukan melalui asesmen kerusakan, rekonstruksi, dan distribusi bantuan lanjutan. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik dan non-fisik seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur, layanan trauma healing. Sementara itu, rekonstruksi dilakukan melalui pendataan kerusakan rumah, program relokasi kolektif dan mandiri, serta pembangunan rumah stimulan yang didukung anggaran pusat.

Pelaksanaan ini dipimpin oleh BPBD dengan pengumpulan usulan program dari perangkat daerah terkait untuk diajukan ke BNPB. Namun, prosesnya masih menghadapi tantangan validasi data. Dalam hal ini, pelaksanaan relokasi telah terlaksana, tetapi pelaksanaan relokasi mandiri masih belum terlaksana. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya dalam tahapan pasca-bencana membutuhkan proses yang panjang dalam pelaksanaannya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Agam, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat pelaksanaan di masa mendatang:

### 1. Teoritis

Bagi Pemerintah Kabupaten Agam, disarankan untuk memperluas jangkauan edukasi kebencanaan dan pelatihan evakuasi ke seluruh wilayah

rawan, termasuk daerah yang sebelumnya belum terjangkau dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, pengembangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terjangkau dan dapat diakses langsung oleh masyarakat di zona rawan, hal ini menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendataan digital yang akurat dan *real-time* dengan memberikan pelatihan teknis kepada petugas lapangan agar proses validasi data dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

SKPD terkait diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa tanggap darurat dan pasca-bencana, khususnya pada saat distribusi logistik, pendataan korban, hingga pembangunan hunian. Program rehabilitasi seperti *trauma healing* dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya bersifat respon awal. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi program relokasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif, dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak. Hal ini penting agar kebijakan relokasi tidak hanya tepat sasaran secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial oleh warga.

## 2. Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem zonasi dan tata ruang pasca-bencana, serta mengevaluasi model kolaborasi multi-aktor dalam manajemen bencana sebagai pendekatan yang inklusif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap program relokasi,

termasuk dampaknya terhadap ketahanan sosial ekonomi warga yang terdampak. Kajian ini dapat memperkaya literatur kebencanaan di Indonesia dan menjadi acuan untuk formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Sementara itu, masyarakat dan unsur relawan seperti Mapala Unand dan PMI diharapkan terus memperkuat peran dalam mendukung proses pendataan, pendampingan psikososial, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti pelatihan mitigasi dan menjaga lingkungan juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap program rehabilitasi dan relokasi agar program pemerintah dapat dievaluasi secara partisipatif dan tepat sasaran.

